

Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Tantangan dan Prospek Kedepan

Uswatun Hasanah¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 uswatunh@radenintan.ac.id

Article Information	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received: Feb, 2022 Accepted: May, 2022 Published: June, 2022</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Tantangan</p>	<p>Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) basically has four important components, such as the ease of creating new study programs, changes to the accreditation system, the ease of becoming Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) or a Legal Higher Education, and providing students with the right to study outside the campus within eight learning programs. This transformative and innovative policy in fact has some problems and challenges that hinder the implementation of MBKM. Therefore, this study aims to examine the challenges and prospects of MBKM policies. This research is a library research with analytical techniques using content analysis and library sources related to the research problems. The results show that the challenges of MBKM are that the MBKM policy has not been fully accepted, the lack of socialization of the credit score assessment mechanism (SKS) with relevant courses, renewal of the LMS and internship mechanism, collaboration between agencies, and PTN-BH problems. Therefore, MBKM will be able to be implemented effectively and comprehensively if various parties are highly committed to do their best, including educational institutions, lecturers, students, as well as the Government that work together to support the implementation of various programs in MBKM to create better human resources and characteristics.</p>

Pendahuluan

Perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kerjakeras bangsa Indonesia yang juga dipadukan dengan hasil adaptasi kemajuan pendidikan di negara lainnya. Perkembangan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung selalu dipengaruhi dengan perubahan dan kemajuan di setiap zamannya mulai dari kemajuan teknologi, ekonomi, juga aspek lainnya yang membentuk peradaban masyarakat. Di era revolusi industri 4.0, menyajikan kemudahan juga tantangan bagi dunia pendidikan. Salah satu bentuk respon pendidikan yaitu lahirnya konsep pendidikan 4.0.

Ciri khas utama pendidikan 4.0 yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan tujuan untuk menciptakan lulusan yang berwawasan luas memiliki kreatifitas tinggi dan inovatif sehingga mampu bertahan menghadapi tantangan zaman.¹ Pandemi Covid-19 serta berkembangnya perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan para pelajar atau peserta didik untuk menyongsong perubahan, kemajuan dan perkembangan zaman.² Sehingga pendidikan dituntut mampu melaksanakan, dan merancang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif, supaya dapat meraih capaian dan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan tentunya juga relevan.³

Lembaga pendidikan harus mempunyai daya inovasi dan juga dapat memberlakukan sebuah kolaborasi, jika sebuah lembaga pendidikan tidak mampu untuk berkolaborasi dan berinovasi maka akan tertinggal jauh di telan waktu, dan pula sebaliknya jika lembaga mampu menciptakan sumber daya yang mampu mengembangkan potensi diri dan *life skill*. Namun realitanya, pendidikan saat ini masih banyak ditemui lembaga pendidikan yang memposisikan peserta didik sebagai objek pendidikan dan Guru sebagai sentral dalam kegiatan pembelajaran.⁴

Hal ini berakibat lemahnya peran peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan saat ini terkesan hanya berorientasi pada tercapainya standar minimal lulusan sehingga hanya fokus pada aspek kognitif yang kemudian berdampak pada kurang relevannya kegiatan pembelajaran dalam meluluskan output yang siap hidup di masyarakat dan bersaing di dunia kerja.

¹ Muhammad Arizki, "Pendidikan Agama Islam Era Revolusi 4.0," *Jurnal Ansiru PAI* 4, no. 2 (2020): 52–71, <http://jurnal.uinsu.ac.id>.

² Miftahul Jannah Akmal and Rustan Santaria, "Mutu Pendidikan Era Revolusi 4.0 Di Tengah Covid-19," *Journal of Teaching and Learning Research* 2, no. 2 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.24256/jtlr.v2i2.1415>.

³ Mariati, "Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi," in *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora* (Deli Serdang: Sintesa Cered Indonesia, 2021), 747–58, <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa>.

⁴ Samsul Arifin, Nurul Abidin, and Fauzan Al anshori, "Ebijakan Merdeka Belajar Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2021): 65–78, Journal.Unipdu.ac.id/index.php/Dirasat/index.

Oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan perlu melakukan reorientasi secara menyeluruh.⁵

Fakta pendidikan saat ini memang telah menyajikan berbagai permasalahan namun disadari atau tidak, permasalahan-permasalahan yang terjadi telah menjadikan masyarakat terutama pemerintah dituntut lebih kreatif, inovatif, dan adaptif untuk selalu berupaya mencari solusi dari setiap permasalahan. Mengembangkan berbagai kebijakan mulai dari kebijakan terkait penanganan Covid-19 sampai pengembangan desain pendidikan agar sesuai dengan kondisi. Salah satu kebijakan besar yang dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadim Anwar Makarim adalah program merdeka belajar.⁶ Kebijakan merdeka belajar pada perkembangan selanjutnya merambah pada ranah Perguruan Tinggi. Sehingga muncul kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ekstrim karena terdapat poin-poin penting yang berbeda di luar kebiasaan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.⁷

Sebenarnya sudah banyak penelitian tentang kebijakan pemerintah terkait merdeka belajar kampus merdeka, namun pembahasannya masih terbatas pada aplikasi konsep merdeka belajar,⁸ meliputi tantangan dan peluang,⁹ kemudian mengkaji pengembangan desain evaluasi,¹⁰ dan metode dalam menerapkan kebijakan merdeka belajar,¹¹ serta pengembangan kurikulum pembelajaran.¹² Pada penelitian terdahulu tersebut belum ada yang mengkaji sampai pada pembahasan

⁵ Elihami, "Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan HOTS Mahasiswa Brbasis Kampus Merdeka," *Edu Psycouns: Journal of Education, Psychology, and Counseling* 1, no. 1 (2019): 79–86.

⁶ Arifin, Abidin, and Al anshori, "Ebijakan Merdeka Belajar Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam."

⁷ Muhammad Yamin and Syahrir, "Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (2020): 126–36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>.

⁸ Nofri Hendri, "Merdeka Belajar: Antara Retorika Dan Aplikasi," *Journal E-Tech* 8, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.1007/XXXXXX-XX-0000-00>.

⁹ Nensi Nofa Sofia, "Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia," *Produ: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2020): 61–72.

¹⁰ Arifin, Abidin, and Al anshori, "Ebijakan Merdeka Belajar Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam."

¹¹ Yamin and Syahrir, "Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran)."

¹² I Bagus Endrawan et al., "Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Pendidikan Olahraga Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Dan Bahasa Universitas Bina Darma," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma* 1, no. 2 (2021): 180–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.33557/pengabdian.v1i1>.

prediksional bagaimana kelangsungan dan tantangan penerapan merdeka belajar kampus merdeka di masa mendatang. Berdasarkan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) meliputi tantangan dan prospek kedepan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis *library research* dan metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang ditujukan untuk mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan meliputi jurnal penelitian ilmiah yang terbaru yang berkaitan dengan pembahasan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka. Data dari hasil pengumpulan data menggunakan dokumentasi kemudian dianalisa menggunakan analisis isi atau biasa dikenal dengan *Content Analysis*, dimaksudkan untuk menganalisa konsep terkait MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengkaji Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program ini relevan dan sejalan melaju pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini tentu saja kita sadari keduanya sangat mempengaruhi kehidupan dalam berbagai aspeknya.¹³

Kebijakan Pemerintah terkait penerapan konsep MBKM saat ini telah menjalani proses pengimplementasian secara menyeluruh di Indonesia dari semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, menengah dan Perguruan Tinggi. Dalam konsep MBKM seluruh lembaga pendidikan diberikan kebebasan dan otonomi serta merdeka dari birokratisasi. Dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi

¹³ Mariati, "Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi."

dibebaskan dari berbagai keterikatan yang mengikat di birokrasi dan mahasiswa juga diberikan kebebasan dalam memilih bidang yang diminati.¹⁴

Program MBKM merupakan bentuk kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sampai tercapainya kultur belajar yang kreatif, inovatif serta tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan. Maka setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi program MBKM sebagaimana peraturan yang telah tertulis dalam Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Kemendikbud.¹⁵

Adapun bentuk kegiatan MBKM sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan kegiatan pembelajaran baik di dalam dan di luar Program Studi dengan 8 kegiatan. Kedelapan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1. Delapan Kegiatan dalam Program MBKM.¹⁶

Delapan kegiatan dalam program MBKM meliputi: *Pertama*, Pertukaran pelajar kegiatan ini dilakukan selain untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mahasiswa tentang ke Binekaan sehingga persaudaraan lintas budaya dan suku semakin kuat terjalin. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun persaudaraan dan transfer ilmu pengetahuan dalam tingkat perguruan tinggi. *Kedua*,

¹⁴ Dirjendikti, *Panduan Program Matching Fund 2021* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

¹⁵ Mariati, "Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi."

Magang/Praktik Kerja, Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Oleh karena itu, kesiapan kerja perlu dibangun melalui proses pembelajaran di luar kelas dengan program magang, namun program yang jangka waktunya kurang dari 6 bulan ini dirasa kurang efektif karena dengan jangka waktu tersebut mahasiswa belum cukup menambah pengalaman dan mengembangkan potensinya. Selain itu, perusahaan yang menerima magang juga berpendapat bahwa dengan jaangka waktu yang hanya satu semester tersebut hanya akan mengganggu aktivitas industri.¹⁷

Ketiga, Proyek Kemanusiaan, program ini berupaya untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiap mahasiswa, program ini merupakan solusi dari mengikisnya rasa kemanusiaan sebagian besar individu di era yang serba canggih ini menjadi pribadi yang individualistik. Oleh karena itu, proyek kemanusiaan bertujuan agar mahasiswa memiliki kepekaan sosial yang tinggi, dengan begitu mahasiswa akan memiliki kemauan dan kesadaran untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi. *Keempat*, kegiatan wirausaha, yaitu suatu program yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kemauan mahasiswa dalam berbisnis dan dilatih untuk dapat mengembangkan usahanya lebih dini dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan.¹⁸

Kelima, Studi/Proyek Independen, program ini dapat dijadikan sebagai program pelengkap untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menciptakan karya besar yang dapat dilombakan baik tingkat nasional sampai internasional. Program ini melengkapi topik atau Mata Kuliah yang tidak masuk dalam jadwal kuliah. *Keenam*, asistensi mengajar di satuan pendidikan merupakan program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang minat dalam bidang pendidikan dengan berkolaborasi antara mahasiswa, mitra sekolah, instansi perguruan tinggi serta dosen sebagai pembimbing lapangan. *Ketujuh*, Penelitian/Riset program ini bertujuan untuk mendorong percepatan dosen maupun mahasiswa untuk meneliti dan produktif menghasilkan karya penelitian.

¹⁶ Dirjendikti, *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*, 1st ed. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020), <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf>.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa dan membangun iklim pendidikan dengan sumber daya peneliti yang terus meningkat dengan regenerasi peneliti sejak dini.¹⁹ *Kedelapan, Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik, Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)* merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.²⁰

Berdasarkan kegiatan yang dicanangkan dalam program tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa di masa depan.

Problematika Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Merdeka Belajar atau Kemerdekaan belajar-kampus merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kurikulum yang adaptif dan inovatif itu dalam hal ini sangat diperlukan, apalagi saat ini kita akan memasuki new normal ditengah industri 4.0, sehingga pembelajaran jarak jauh nantinya akan menjadi trend masa depan, oleh karena itu kurikulum itu harus fleksibel. Namun dalam praktiknya terdapat berbagai problematika yaitu: ***Program dalam kebijakan MBKM***, dalam penerapan kebijakan MBKM pada dasarnya masih tetap menggunakan kurikulum KKNi namun kontennya yang kemudian disesuaikan dan ditambah dengan program-program merdeka belajar. Selama ini masih terjadi miskonsepsi yang menganggap bawa MBKM adalah sebuah kurikulum. Selain itu program dalam kebijakan MBKM yang lebih cenderung pada paraktek bukan hanya memnpelajari konsep ternyata dikawatirkan dapat mengesampingkan tujuan utama pendidikan.

¹⁹ Dirjendikti, *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*.

²⁰ Dirjendikti.

Kebijakan Masih Parsial, Butir-butir dalam kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka masih parsial dan belum menuju ke titik tujuan yang ingin dicapai, belum terintegrasi dengan tujuan yang terintegrasi dengan landasan keilmuan, kemampuan berpikir, regulasi, dan filosofi dasar negara serta tatanan beragama.²¹ **Pola Pikir**, Sampai sekarang masih banyak perguruan tinggi yang belum siap menjalankan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, realitas yang kita hadapi, yaitu perubahan mindset (pola pikir) yang masih butuh waktu. **Penyusunan Kurikulum di Program Studi**, Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar di Program Studi yang tetap mengacu pada KKNI bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim penyusun di program studi yang baru saja selesai menyusun kurikulum.²²

Kebijakan pembukaan program studi (prodi) baru, Kebijakan ini memberikan angin segar ditengah sulitnya birokrasi dan persyaratan pengajuan prodi baru dan akreditasi. Pada tataran praktis, salah satu persyaratan yang mewajibkan adanya kolaborasi antara PT dan prodi dengan pihak luar (perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta) memunculkan kebingungan dalam mekanismenya. Bagi PT besar hal ini tidak menjadi persoalan besar, tetapi bagi PT kecil kewajiban ini memunculkan persoalan tersendiri. Muncul beberapa pertanyaan di kalangan PT kecil atau PT yang masuk pada kategori tertinggal, terluar, dan terpencil, 1) bagaimana cara PT menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa dan industri besar, 2) apakah PT dan PTN besar mau berkolaborasi dengan PT kecil atau PT dengan akreditasi A berkolaborasi dengan PT yang hanya memiliki akreditasi B bahkan C dan seterusnya.²³

Kebijakan PTN-BH, memberikan harapan besar bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing secara internasional. Kebijakan PTN-BH sebelumnya dirasakan sangat rigid dan berat, di antaranya PTN harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH, mayoritas prodi PTN harus

²¹ Susetyo, "Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu," in *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2020), 29–43, <https://ejournal.unib.ac.id/semiba/issue/archive>.

²² Susetyo.

²³ HR Sabriadi and Nurul Wakia, "Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi," *Adaara* 11, no. 1 (2021): 175–84.

terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH, PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial, kurikulum dan kebijakan dibandingkan PTN-BH. Pada kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” ini, Nadiem memangkas birokrasi dan persyaratan yang rumit, tidak adanya batasan minimal akreditasi, dan fleksibilitas waktu pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status.²⁴

Kebijakan magang/praktik industri, merupakan kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja.²⁵ Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan bagi PT kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kolaborasi antara prodi dengan PT dan prodi besar (merujuk pada tingkatan akreditasi) serta instansi besar sesuai pada poin 2 di atas, muncul pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut. PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah ke bawah, pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjang kegiatan lainnya.²⁶

Selain itu program magang yang seharusnya dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan, realitannya intensitas keterlibatannya masih kurang,²⁷ lebih lanjut, kurangnya sosialisasi teknis dan mekanisme magang serta Ditambah lagi kebingungan yang terjadi dalam proses konversi dan rekognisi jumlah SKS ke dalam Mata Kuliah (MK) yang sesuai.²⁸

²⁴ Sofia, “Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia.”

²⁵ A Faiz and Purwati, “Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan General Education,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 3 (2021): 649–55.

²⁶ Sabriadi and Wakia, “Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi.”

²⁷ H Hayati, “Evaluasi Peserta Magang Di Instansi Pemerintahan Dengan Metode Bekerja Di Rumah (Studi Kualitatif Sebagai Persiapan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka).,” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan SDM* 10, no. 2 (2021): 229–34, <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/view/860>.

²⁸ Bisma Arbiansha Putra, Carissa Maulida Qomariyah, and Candra Aditya, “Eksistensi Dan Implementasi Program Magang MBKM Di Arwana Studio Engineering Consultan Malang,” in *Conference on Inovation and Application of Science and Technology* (Malang: Universitas Widyagama, 2021), 1011–16.

Rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap program magang ini juga menyebabkan program ini belum secara efektif terlaksana karena rendahnya jumlah mahasiswa yang mengikuti magang.²⁹

Tantangan dan Prospek Kedepan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Tantangan kedepannya terkait pendidikan akan semakin kompleks karena di masa depan pendidikan akan menghadapi VUCA yaitu suatu akronim dari Volatilitas (Volatility), ketidakpastian (Uncertainty), kompleksitas (Complexity), ambiguitas (Ambiguity).³⁰ Sehingga Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang *out of the box* yaitu kebijakan inovatif di luar batasan dan kebiasaan kebijakan pada umumnya. Karena Menteri Nadiem Makarim meyakini bahwa untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, indikator utamanya adalah meningkatkan potensi mahasiswanya sehingga mampu melahirkan lulusan dengan skill yang dibutuhkan dan relevan dengan zaman.

Oleh karena itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas lulusan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Pada dasarnya program MBKM memiliki empat point penting yaitu program yang memudahkan pembukaan program studi baru, perubahan dalam sistem akreditasi, memberikan kemudahan untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan memberikan hak belajar mahasiswa di luar kampus.³¹ Pada dasarnya program MBKM memiliki empat poin penting yaitu program yang memudahkan pembukaan program studi baru, adanya perubahan dalam sistem akreditasi, memberikan kemudahan untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar kampus.³²

Program inovatif dan reformatif yang tidak biasa ini tentu saja dalam pengimplementasiannya akan terdapat kendala ataupun tantangan yang mengiringinya.

²⁹ M Takdir et al., "Polemik Implementasi Program Magang MBKM Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai," *Al-Qisthi* 11, no. 2 (2021): 22–35.

³⁰ Adelya Salsabila Putri, "Inovasi Pendidikan Jadi Kunci Utama Hadapi VUCA," *UNAIR News*, April 2021, <https://news.unair.ac.id/2021/04/08/inovasi-pendidikan-jadi-kunci-utama-hadapi-vuca/>.

³¹ I Dzikria and L.F Narulita, "Pengembangan Kurikulum Untuk Pembentukan Jurusan Sistem Informasi Untag Surabaya Berbasis Kurikulum MBKM Dan ACM IS Dengan Metode Kualitatif," in *Proceeding KONIK*, 2021, 229–34.

³² Dzikria and Narulita.

Tantangan dan prospek kedepan penerapan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka yaitu sebagai berikut:

Pertama, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan ini pada realitanya masih belum sepenuhnya diterima di ekosistem Pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi. Dalam ranah Perguruan Tinggi Islam, kebijakan ini memuat berbagai program yang dalam penerapannya masih menimbulkan kebingungan terkait teknis dan mekanisme pelaksanaannya. Prospek kedepannya, jika pemerintah dan lembaga pendidikan berkomitmen kuat untuk menerapkan kebijakan MBKM hendaknya dimulai dari pembuatan panduan atau pedoman pelaksanaan setiap program MBKM, Maka hasil yang diharapkan akan sesuai dengan esensi tujuan diberlakukannya kebijakan MBKM. Selanjutnya kebijakan MBKM dapat terlaksana dengan efektif dengan terwujudnya kemajuan dan perkembangan setiap institusi pendidikan.

Kedua, kurangnya sosialisasi penyesuaian SKS dengan materi atau Mata Kuliah antar instansi.³³ Ini menjadi tantangan besar dalam penerapan MBKM. Institusi pendidikan khususnya institusi pendidikan Islam realitanya belum dapat menerapkan kebijakan MBKM ini, karena belum ada sosialisasi dan diskusi terbuka terkait cara merkognisi serta mengkonversi jumlah angka kredit dengan Mata Kuliah yang sesuai, bagaimana teknisnya, apa saja indikator hasil dari delapan program belajar di luar kelas bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah dan pertanyaan lainnya masih menjadi kendala besar yang harus segera dicarikan solusinya. Prospek kedepannya, jika kondisi ini tidak diperbaiki maka penerapan kebijakan MBKM tidak akan dapat berjalan secara efektif dan komprehensif.

Ketiga, Sistem pembelajaran yang digunakan saat ini melalui LMS (*Learning Management System*) untuk menunjang kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Sistem ini mengakomodir segala bentuk kegiatan pembelajaran diantaranya presensi kehadiran, materi, tugas, ujian, nilai, dan lain sebagainya. Dengan tersentralisasi sistem pembelajaran di server perguruan tinggi yang kemudian harus ditambah dan disesuaikan dengan mekanisme penerapan program

MBKM pada realitanya mengakibatkan permasalahan baru terkait kemampuan server dalam menangani sistem pembelajaran tersebut.³⁴

Keempat, Mekanisme magang, PTN-BH dan mekanisme kolaborasi pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan yaitu problema magang bagi PTN kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Program Studi dengan Pihak Luar, serta kebijakan pembukaan program studi (prodi) baru, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan masalah pada penerapan/implementasiya. Melihat realitas terkait kebijakan PTN-BH ini maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berani mematok target tinggi bagi PTN dengan kemudahan birokrasi dan pasokan anggaran yang cukup untuk go international, tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri.³⁵

Penutup

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada prinsipnya memiliki empat point penting yaitu kemudahan dalam pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi, kemudahan untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan memberikan hak belajar mahasiswa di luar kampus. Kebijakan MBKM yang di gagas oleh Menteri Nadiem Makarim merupakan kebijakan yang reformatif, inovatif, di luar kebiasaan zona aman iklim pendidikan di Indonesia. Tujuannya agar pendidikan di Indonesia melakukan percepatan dalam peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari kualitas lembaga pendidikan sampai kualitas lulusan yang haru memiliki skill yang relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan berbagai pihak, sosialisasi yang intens, dan dukungan pemerintah agar problematika dan tantangan dalam pengimplementasian kebijakan ini dapat diminimalisir dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

³³ Bakti Abdillah Putra et al., "Peluang Dan Tantangan Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya," *Edu Cendikia* 2, no. 1 (2022): 6–13, <https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i01.1399>.

³⁴ Sahid Agustian Hudjimartsu et al., "Peluang Dan Tantangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Fakultas Teknik Dan Sains UIKA Bogor," *Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 58–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/educate.v7i1.6245>.

³⁵ Sofia, "Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia."

Penelitian masih sebatas pada mengkaji aspek tantangan dan prospek kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara umum, maka saran untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji secara lebih spesifik terkait implementasi masing-masing program dalam kebijakan MBKM.

Daftar Pustaka

Akmal, Miftahul Jannah, and Rustan Santaria. "Mutu Pendidikan Era Revolusi 4.0 Di Tengah Covid-19." *Journal of Teaching and Learning Research* 2, no. 2 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.24256/jtlr.v2i2.1415>.

Arifin, Samsul, Nurul Abidin, and Fauzan Al anshori. "Ebijakan Merdeka Belajar Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2021): 65–78. Journal.Unipdu.ac.id/index.php/Dirasat/index.

Arizki, Muhammad. "Pendidikan Agama Islam Era Revolusi 4.0." *Jurnal Ansiru PAI* 4, no. 2 (2020): 52–71. <http://jurnal.uinsu.ac.id>.

Dirjendikti. *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. 1st ed. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf>.

———. *Panduan Program Matching Fund 2021*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.

Dzikria, I, and L.F Narulita. "Pengembangan Kurikulum Untuk Pembentukan Jurusan Sistem Informasi Untag Surabaya Berbasiskan Kurikulum MBKM Dan ACM IS Dengan Metode Kualitatif." In *Proceeding KONIK*, 229–34, 2021.

Elihami. "Implementasi Lasyanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan HOTS Mahasiswa Brbasis Kampus Merdeka." *Edu Psycouns: Journal of Education, Psychology, and Counseling* 1, no. 1 (2019): 79–86.

Endrawan, I Bagus, Bayu Hardiyono, M.Haris Satria, and Selvi Atesya Kesumawati. "Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

- Program Studi Pendidikan Olahraga Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Dan Bahasa Universitas Bina Darma." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma* 1, no. 2 (2021): 180–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.33557/pengabdian.v1i1>.
- Faiz, A, and Purwati. "Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan General Education." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 3 (2021): 649–55.
- Hayati, H. "Evaluasi Peserta Magang Di Instansi Pemerintahan Dengan Metode Bekerja Di Rumah (Studi Kualitatif Sebagai Persiapan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka)." *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan SDM* 10, no. 2 (2021): 229–34. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/view/860>.
- Hendri, Nofri. "Merdeka Belajar: Antara Retorika Dan Aplikasi." *Journal E-Tech* 8, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.1007/XXXXXX-XX-0000-00>.
- Hudjimartsu, Sahid Agustian, Muhammad Nanang Prayudyanto, Setya Permana Sutisna, and Arien Heryansyah. "Peluang Dan Tantangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Fakultas Teknik Dan Sains UIKA Bogor." *Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 58–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/educate.v7i1.6245>.
- Mariati. "Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi." In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 747–58. Deli Serdang: Sintesa Cered Indonesia, 2021. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa>.
- Putra, Bakti Abdillah, Anne Inayah Salsabila, Kinanti Reski Nabila, and Raisah Zakiah. "Peluang Dan Tantangan Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya." *Edu Cendikia* 2, no. 1 (2022): 6–13. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i01.1399>.

- Putra, Bisma Arbiانشا, Carissa Maulida Qomariyah, and Candra Aditya. "Eksistensi Dan Implementasi Program Magang MBKM Di Arwana Studio Engineering Consultan Malang." In *Conference on Inovation and Application of Science and Technology*, 1011–16. Malang: Universitas Widyagama, 2021.
- Putri, Adelya Salsabila. "Inovasi Pendidikan Jadi Kunci Utama Hadapi VUCA." *UNAIR News*. April 2021. <https://news.unair.ac.id/2021/04/08/inovasi-pendidikan-jadi-kunci-utama-hadapi-vuca/>.
- Sabriadi, HR, and Nurul Wakia. "Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi." *Adaara* 11, no. 1 (2021): 175–84.
- Sofia, Nensi Nofa. "Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia." *Produ: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2020): 61–72.
- Susetyo. "Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu." In *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*, 29–43. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2020. <https://ejournal.unib.ac.id/semiba/issue/archive>.
- Takdir, M, K.R Sani, S.R Juniati, and Z Arifin. "Polemik Implementasi Program Magang MBKM Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai." *Al-Qisthi* 11, no. 2 (2021): 22–35.
- Yamin, Muhammad, and Syahrir. "Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (2020): 126–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>.